

# info

L E M B A R

Divisi  
Perlindungan  
Kelompok  
Rentan  
Diskriminasi  
(PKRD)

edisi #3  
Februari 2006

## Sidang Ke-3

### Komite Migran PBB

## Upaya Perlindungan Buruh Migran



ADA tanggal 12 – 16 Desember 2005 telah berlangsung sidang ketiga Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families atau lebih dikenal dengan CMW (Com-

mittee on Migrant Workers) yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut Komite Buruh Migran. Sidang ketiga ini membahas beberapa agenda yaitu: 1) Keorganisasian; 2) Laporan Ketua Komite Buruh Migran; 3) Pembahasan Laporan Mali; 4) Penyerahan laporan dari negara-negara peserta; 5) Reformasi Treaty Body PBB; 6) Diskusi Umum; serta 7) Memperingati hari buruh migran Internasional yang jatuh tanggal 18 Desember.

Tati Krisnawaty, Ketua Subkom Divisi Perlindungan Kelompok Rentan Diskriminasi Komnas Perempuan yang juga *Convener Taskforce Labour and Migration APWLD (Asia Pacific Women Law and Development)* hadir dalam sidang ke-3 ini. Dalam diskusi

Komite ini juga membuka peluang bagi setiap individu yang terlanggar hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam konvensi Migran, untuk menyampaikan komplain secara langsung.

tersebut Tati menyampaikan paper tentang pentingnya membangun perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang sebagian besar perempuan serta mengalami kondisi rentan diskriminasi dan kekerasan. Dalam pemaparan tersebut juga disampaikan peran strategis Komite Buruh Migran untuk memastikan peran Negara yang mempekerjakan buruh migrant terutama perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga terlindungi hak-haknya.

#### DARI SIDANG KE-3 KOMITE BURUH MIGRAN DIKETAHUI BAHWA:

1. Sebanyak 34 negara telah meratifikasi Konvensi Migran 1990 ini. Karena Indonesia baru menandatangani maka Indonesia belum menjadi

anggota yang berhak memberi masukan maupun kewajiban untuk memberi laporan.

2. Komite Buruh Migran juga telah menyiapkan *guideline*/panduan untuk membantu negara-negara anggota mempersiapkan laporannya. Juga sedang disiapkan *High Level Meeting* dengan tema *Migration and Development* yang akan dilaksanakan pada bulan September 2006 di New York. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh *International Bodies* (Badan-badan internasional), kepala-kepala Negara anggota PBB terutama *state parties*, dan juga perwakilan dari kelompok sipil seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejenisnya.
3. Untuk mengefektifkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, Komite Buruh Migran telah merencanakan dua pertemuan anggota yang masing-masing akan diselenggarakan pada bulan April/Mei 2006 dan bulan November/Desember 2006.

Dari adanya Komite Buruh Migran serta sidang yang berlangsung ini, apa kepentingan Indonesia sebagai Negara pengirim

buruh migran? Berikut sekilas tentang Komite Buruh Migran serta kepentingan Indonesia atas peran yang dilakukan oleh Komite Buruh Migran.

#### SEKILAS TENTANG KOMITE BURUH MIGRAN

Komite Buruh Migran (*Committee on Migrant Workers* selanjutnya disingkat CMW), merupakan salah satu badan resmi dalam lingkungan PBB yang dibentuk pada bulan Desember 2003. Komite ini merupakan badan para pakar independen yang bertugas memantau penerapan Konvensi Migran 1990 di setiap negara yang telah meratifikasi konvensi itu. Keberadaan CMW merupakan tindak lanjut dari mulai diterapkannya Konvensi Migran pada tanggal 1 Juli 2003 setelah lebih dari 20 negara meratifikasi Konvensi Migran.

Saat ini CMW memiliki sepuluh orang anggota yang sebagian merangkap ketua, wakil ketua dan *rappporteur* (pelapor). Mereka adalah Mr. Prasad Kariyawasam dari Sri Lanka sebagai ketua; Mr. José S. Brillantes dari Filipina, Ms. Anamaria Dieguez dari Guatemala dan Mr. Ahmed Hassan El-Borai dari Mesir masing-masing sebagai wakil ketua. Adapun Mr. Francisco Alba dari Mexico sebagai pelapor; dan lima orang sebagai anggota: Mr. Francisco Carrion-Mena dari Ekuador, Ms. Ana Elizabeth Cubias Medina dari El Salvador, Mr. Abdelhamid El Jamri dari Maroko, Mr. Arthur Shatto Gakwandi dari Uganda dan Mr. Azad Taghizadet dari Azerbaijan. Jumlah Komite akan meningkat menjadi 14 orang jika jumlah yang meratifikasi Konvensi telah mencapai 42 negara.

Dalam hal pelaksanaan sidang, normal-

## catatan tambahan

1. *General Assembly* Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menghasilkan resolusi 60/227 paragraf 19 tertanggal 23 Desember 2005. Hasil resolusi ini menginformasikan bahwa isu migrasi dan pembangunan juga akan menjadi perhatian khusus Komisi-komisi di PBB seperti *the Commission on Population and Development*, *the Commission on Social Development* dan *the Commission on the Status of Women (CSW)*. CSW sendiri akan menyelenggarakan *high-level panel* dengan tema "Dimensi Gender dalam Migrasi Internasional pada sidangnya yang berlangsung tanggal 27 Februari – 10 Maret 2006 ini. Hasil dari *high-level panel* ini akan diserahkan ke *High-level Dialogue* tentang Migrasi Internasional dan Pembangunan yang akan berlangsung di New York tersebut melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Informasi lebih lanjut tentang hal ini dapat mengakses:  
<http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw50/HighLevelPanel.html#top>
2. *Global Commission on International Migration (GCIM)* telah membuat laporan komprehensif tentang *Migration in Interconnected World: New Direction for Action*. GCIM sendiri adalah lembaga independen yang diinisiasi berdirinya oleh PBB serta diberi mandat untuk menyediakan framework yang komprehensif terkait dengan isu migrasi. Keanggotaannya sendiri terdiri dari negara-negara dan 19 orang Komisioner yang merupakan tokoh serta ahli terkait dengan isu migrasi dari berbagai negara. Atas laporan yang dibuat GCIM ini Komite Migran PBB memberi perspektif kritis, salah satunya adalah GCIM kurang merekomendasikan tentang upaya meratifikasi/menandatangani Konvensi Migran oleh negara-negara terutama pengirim buruh migran. Untuk laporan GCIM lebih lengkap bisa mengakses:  
<http://www.gcim.org/en/finalreport.html>

nya Komite Buruh Migran melaksanakan sidang sekali setiap tahunnya. Sidang pertama telah berlangsung pada Maret 2004 yang disebut sebagai *innagural session* serta sidang kedua baru dilakukan setahun kemudian yaitu pada bulan April 2005.

### PERAN DAN FUNGSI

Komite Buruh Migran adalah bagian dari Treaty Body PBB yang mempunyai mandate untuk monitoring implementasi Konvensi Migran 1990 melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara peserta. Selain itu Komite Buruh Migran juga mengembangkan *guideline*/panduan untuk membantu negara-negara peserta mempersiapkan laporannya. Pertimbangan Komite Buruh Migran atas laporan yang disusun oleh negara-negara peserta akan membuka ruang dialog dan rekomendasi berdasarkan pada praktik-praktik baik dalam memenuhi perlindungan hak buruh migran dan anggota keluarganya yang dilakukan oleh suatu negara. Dalam kegiatannya Komite Buruh Migran juga membangun kerjasama dengan ILO untuk peran *consultative capacity*, *specialized agencies* dan *intergovernmental organization* serta membangun *regional dialogue* dengan para NGO.

### KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA

Untuk menjalankan peran dan fungsi di atas, setiap negara yang meratifikasi Konvensi Migran berkewajiban menyerahkan

Diterbitkan Oleh: Divisi Perlindungan Kelompok Rentan Diskriminasi (PKRD) Komnas Perempuan. Divisi PKRD adalah Divisi yang peduli pada persoalan perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga, perempuan pekerja rumah tangga, dan perempuan buruh migran. Ketua Sub Kom: Tati Krisnawaty Anggota: Kamala Chandrakirana, Sjamsiah Achmad Koordinator Divisi: Lisa Noor Humaidah Asisten Koord. untuk Advokasi: Tety Kuswandary Asisten Koord. untuk Data dan Jaringan: Saherman Alamat: Jl. Latuharhari No.4B, Jakarta. Telp.021-3903963 Fax. 021-3903922

e-mail: [mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)

Website: [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id)

laporan reguler (setahun pertama dan selanjutnya setiap lima tahun sekali) kepada Komite Buruh Migran mengenai penerapan Konvensi oleh masing-masing negara. Sebagai informasi, hingga Desember 2005 ini, baru Mexico dan Mali yang telah menyerahkan laporan reguler.

## KEPENTINGAN INDONESIA

Dari penjelasan diatas tentang Komite Buruh Migran, ada beberapa hal strategis yang bisa diperankan oleh Indonesia jika telah meratifikasi Konvensi Migran dan menjadi anggota Komite:

1. Indonesia berkesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan di tingkat Internasional terlebih sebagai Negara yang menempatkan warganya untuk bekerja di luar negeri dan merupakan bagian tanggung jawab negara untuk menjamin HAM seluruh warganya, terutama mereka yang bekerja di luar negeri.
2. Sebagai anggota Komite, Indonesia bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan persoalan buruh migran dan mendorong Komite ini menciptakan terobosan-terobosan baru untuk melindungi buruh migrant yang paling rentan yaitu PRT (pekerja

rumah tangga). Dengan keanggotaan aktif Indonesia dalam Komite ini, Indonesia bisa mengembangkan strategi diplomasi internasional yang lebih efektif untuk melindungi warga Indonesia yang terlempar dari peluang-peluang ekonomi di dalam negeri.

3. Komite ini juga membuka peluang individu yang terlanggar hak-haknya yang telah diatur dalam Konvensi ini untuk menyampaikan komplain secara langsung. Walaupun terbatas pada mekanisme yang diterapkan, hal ini memberi kesempatan kepada buruh migran untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi di tingkat Internasional dimana negara-negara anggota akan memberi respon dan desakan kepada negara bersangkutan yang melanggar.

Dari uraian di atas penting untuk dicatat di sini bahwa menjadi anggota Komite maupun pihak yang meratifikasi Konvensi juga mengandung beberapa kelemahan. Diantara kelemahan itu adalah Konvensi Internasional seringkali hanya berbunyi di level internasional, dia tidak membunyi di tingkat nasional terutama dalam perangkat perundang-undangan yang terkait. Dalam hal ini masih diperlukan *political will* yang kuat dari aparat pemerintah.

Namun demikian, tetap kita berkepentingan menggalang keterlibatan dunia Internasional sebagai bagian dari upaya perlindungan buruh migran terutama buruh migran Indonesia. Salah satu cara untuk menggalang ini adalah Indonesia segera meratifikasi Konvensi Migran dan menjadi anggota Komite Buruh Migran.<sup>11</sup>